

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Renja Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses Penyusunan Dalam prosesnya penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD), rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dilakukan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Renstra PD dan pada akhirnya Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja PD untuk Rencana Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja-PD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, mengacu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari;
21. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten manokwari;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, antara lain :

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan ;

3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Manokwari Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat:

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat:

rencana kerja secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 dan Renstra BPKAD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 Pelaksanaan Evaluasi Renja pada Tahun (n-3) dan (n-2) belum bisa dilaksanakan dikarenakan Renstra dalam pelaksanaannya masih berjalan 2 Tahun.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun	5 Dokumen							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	12 Bulan							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi	100 Orang							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik, jasa instalasi listrik yang disediakan	12 Bulan							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	12 Bulan							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, dokumen yang digandakan dan dijilid	12 Bulan							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	12 Bulan							
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	12 Bulan (59 Orang)							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diadakan	46 Unit							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat dan benda pos yang disediakan	1000 Materai							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik	12 Bulan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	38 Unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara								
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Pelantikan dan Ramah Tamah Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021 s/d 2024	100%							
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen							
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen							
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen							
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen							
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah perda APBD dan perbup penjabaran APBD yang disusun	2 Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda perubahan APBD dan perbup penjabaran perubahan APBD yang disusun	2 Dokumen							
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja daerah yang disusun								
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		12 Bulan							
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		12 Bulan							
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	-							
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		12 Bulan							
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen							
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	4 Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan	Jumlah peraturan daerah dan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi	-							
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terselesaikannya Pinjaman Pemerintah Kepada Bank Papua	12 Bulan							
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang mendapat Hibah	12 Bulan							
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota									
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku standar satuan harga yang disusun	1 Dokumen							
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Administrasi, Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	5 Unit							
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen SK penetapan status penggunaan, dokumen pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD	2 SK							
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Manokwari didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		√		WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	-	-	100%	150%	150%
2	Penetapan APBD		√		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	100	100
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan			√	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	4,89	4,9	7,63	7,93	6,39	62%	62%	97%	100%	81%
4	Belanja langsung terhadap total APBD			√	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	50,57	51,42	57,5	61,76	45,05	101%	102%	115%	123%	90%
5	Ketepatan Waktu Penyampain Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	0	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, Badan mengacu pada visi Kabupaten Manokwari Yaitu : **Terwujudnya Kabupaten Manokwari**

Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Kabupaten Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, mandiri dan Sejahtera.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manokwari, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. BPKAD Kabupaten Manokwari mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. pelaksanaan Tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Saat ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Manokwari pada umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut meliputi :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa pengecualian atas LKPD Pemerintah Kabupaten Manokwari
2. Dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah
3. Mengadakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Adanya Diklat, Seminar, Workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan/swasta
5. Melakukan pendampingan tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
6. Ketepatan Waktu dalam menyajikan LKPD
7. Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI dengan penerapan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, Aplikasi Sistem Informasi Gaji
8. Menindaklanjuti segera rekomendasi BPK dengan melibatkan OPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari merupakan perkiraan

tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2022. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 dan pada tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari yang sudah dicapai tersebut, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilaksanakan dalam mencapai RPJMD 2021-2026. Adapun beberapa permasalahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari yang belum Optimal
2. Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada setiap SKPD.
3. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan OPD yaitu kuasa pengguna anggaran PPK OPD, bendahara pengeluaran dan bendahara barang, PPTK
4. Sistem penatausahaan keuangan yang belum dikuasai oleh PPK OPD, bendahara pengeluaran dan bendahara barang Mempertahankan Opini BPK terhadap LKPD
5. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan OPD yaitu kuasa pengguna anggaran PPK OPD, bendahara pengeluaran dan bendahara barang, PPTK

Maka isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manokwari belum optimal dikarenakan masih kurang tertibnya pencatatan tertib administrasi barang milik daerah;
2. Mempertahankan Opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Manokwari

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang di capai oleh pemerintah daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2022 dengan melakukan identifikasi prioritas program/kegiatan. Tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BPKAD, sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan SKPD.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan tidak ada perbedaan program pada Rancangan Awal RKPD, RPJMD dan juga RENSTRA perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPKAD merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum fungsi penunjang, yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat. Namun demikian terkait dengan usulan alokasi untuk hibah dan bansos yang berupa uang (Tunai), BPKAD mengalokasikan anggaran Pada APBD dan rekomendasi dari Bupati sebagai pengampu hibah bansos sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat Indonesia diberbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana yang tercantum dalam Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Propenas merupakan rencana induk dan acuan perencanaan nasional hasil konsensus serta komitmen bersama masyarakat Indonesia, yang memuat target pencapaian visi dan misi bangsa. Propenas juga merupakan sarana untuk menyatukan persepsi, pandangan dan langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia sesuai karakteristik dan budaya dalam menyusun dan melaksanakan prioritas pembangunan pada masa yang akan datang.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah untuk melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan sebagai acuan rencana tindak, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Manokwari menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan menyusun Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga terjalin hubungan keselarasan yang saling melengkapi mulai dari proses perencanaan program kegiatan dan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepada Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Kabupaten Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing,Maju,mandiri dan Sejahtera”**.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dan dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Adapun Target tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Manokwari tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Kabupaten Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, mandiri dan Sejahtera			
MISI.9	:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Kuat Profesional dan Partisipatif			
TUJUAN		SASARAN	Indikator SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Sakip	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik, bersih dan berwibawa	Terciptanya kapasitas dan kualitas sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik, bersih dan berwibawa	
			Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal (SPBE)	Meningkatkan Kapasitas, Kualitas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Secara Komperatif	Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Profesional, disiplin, jujur dan memiliki kompetensi sesuai Pendidikan
				Mempercepat implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Peningkatan implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
				Meningkatnya layanan publik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik, Keuangan, Pengelolaan Aset Serta Keterbukaan Informasi Melalui Layanan Elektronik
	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Opini BPK	Meningkatkan sistem legislasi dan regulasi daerah dan nasional yang harmonis dan komperhensif dalam mendukung	Peningkatan sistem legislasi dan regulasi daerah dan nasional yang harmonis dan komperhensif dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan	

			penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan daerah	daerah
			Meningkatnya layanan publik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik, Keuangan, Pengelolaan Aset Serta Keterbukaan Informasi Melalui Layanan Elektronik

3.3 Program dan Kegiatan:

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program kerja BPKAD Kabupaten Manokwari SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Manokwari dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota, yang terdiri atas 7 Kegiatan
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri atas 4 Kegiatan
 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri atas 1 kegiatan
 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun Anggaran 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator kinerja BPKAD yang tercapai			Rp 66.607.289.506,00			Rp 66.607.289.506,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Ketersediaan dokumen LAKIP, RENJA dan LK OPD	Kab. Manokwari		Rp 49.989.000,00			Rp 49.989.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Manokwari	4 Dokumen	Rp 49.989.000,00		4 Dokumen	Rp 49.989.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Manokwari		Rp 10.483.700.056,00			Rp 10.483.700.056,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manokwari	67 Orang	Rp 10.483.700.056,00		67 Orang	Rp 10.483.700.056,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Manokwari		Rp 199.999.700,00			Rp 199.999.700,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Manokwari	16 Orang	Rp 199.999.700,00		16 Orang	Rp 199.999.700,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kab. Manokwari		Rp 30.942.813.750,00			Rp 30.942.813.750,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 585.557.000,00		12 Bulan	Rp 585.557.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 587.703.350,00		12 Bulan	Rp 587.703.350,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 8.184.984.400,00		12 Bulan	Rp 8.184.984.400,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 2.780.649.000,00		12 Bulan	Rp 2.780.649.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 161.800.000,00		12 Bulan	Rp 161.800.000,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 15.861.300.000,00		12 Bulan	Rp 15.861.300.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 2.780.820.000,00		12 Bulan	Rp 2.780.820.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Manokwari					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Manokwari	1 Unit	Rp 3.000.000.000,00		1 Unit	Rp 3.000.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Kinerja Pegawai Honoror	Kab. Manokwari		Rp 18.731.800.000,00			Rp 18.731.800.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Manokwari	1000 Materai	Rp 3.000.000,00		1000 Materai	Rp 3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 299.600.000,00		12 Bulan	Rp 299.600.000,00

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 18.429.200.000,00		12 Bulan	Rp 18.429.200.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Manokwari		Rp 3.198.987.000,00			Rp 3.198.987.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Manokwari	38 Unit	Rp 2.306.187.000,00		38 Unit	Rp 2.306.187.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 442.800.000,00		12 Bulan	Rp 442.800.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Manokwari		Rp 450.000.000,00			Rp 450.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Manokwari		Rp 275.656.180.562,00			Rp 275.656.180.562,00
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Kab. Manokwari		Rp 3.862.439.300,00			Rp 3.862.439.300,00
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Manokwari	2 Dokumen	Rp 364.467.100,00		2 Dokumen	Rp 364.467.100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Manokwari	2 Dokumen	Rp 291.769.400,00		2 Dokumen	Rp 291.769.400,00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 212.578.300,00		1 Dokumen	Rp 212.578.300,00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 212.818.600,00		1 Dokumen	Rp 212.818.600,00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 327.650.900,00		1 Dokumen	Rp 327.650.900,00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 329.683.200,00		1 Dokumen	Rp 329.683.200,00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Manokwari	2 Dokumen	Rp 822.016.800,00		2 Dokumen	Rp 822.016.800,00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Manokwari	2 Dokumen	Rp 1.301.455.000,00		2 Dokumen	Rp 1.301.455.000,00
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Kab. Manokwari		Rp 198.686.717.600,00			Rp 198.686.717.600,00
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Manokwari		Rp 104.945.100,00			Rp 104.945.100,00
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 314.409.100,00		12 Bulan	Rp 314.409.100,00
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 209.909.400,00		12 Bulan	Rp 209.909.400,00
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Manokwari	-	Rp 188.777.488.200,00		-	Rp 188.777.488.200,00
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 279.965.800,00		12 Bulan	Rp 279.965.800,00

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Kab. Manokwari		Rp 1.524.599.300,00			Rp 1.524.599.300,00
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 199.999.800,00		1 Dokumen	Rp 199.999.800,00
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Manokwari	4 Dokumen	Rp 970.599.500,00		4 Dokumen	Rp 970.599.500,00
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Manokwari	2 Dokumen	Rp 300.000.000,00		2 Dokumen	Rp 300.000.000,00
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Manokwari	100 Orang	Rp 54.000.000,00		100 Orang	Rp 54.000.000,00
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kab. Manokwari		Rp 80.582.424.362,00			Rp 80.582.424.362,00
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 6.504.424.984,00		12 Bulan	Rp 6.504.424.984,00
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Kab. Manokwari		Rp 199.981.400,00			Rp 199.981.400,00
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Manokwari	12 Bulan	Rp 71.160.577.267,00		12 Bulan	Rp 71.160.577.267,00
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Manokwari		Rp 2.717.440.771,00			Rp 2.717.440.771,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Manokwari		Rp 813.872.300,00			Rp 813.872.300,00
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kab. Manokwari		Rp 813.872.300,00			Rp 813.872.300,00
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 199.999.800,00		1 Dokumen	Rp 199.999.800,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Manokwari	5 Unit	Rp 134.118.200,00		5 Unit	Rp 134.118.200,00
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Manokwari	2 SK	Rp 129.754.300,00		2 SK	Rp 129.754.300,00
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Kab. Manokwari	1 Dokumen	Rp 350.000.000,00		1 Dokumen	Rp 350.000.000,00

Tabel Rencana Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Induk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari sebelum perubahan mengampu 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Sub kegiatan- sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB V PENUTUP

Dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 disusun dengan maksud menyediakan pedoman kerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023. Sehingga dapat menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.

Selain itu, dokumen Renja 2022 ini dijadikan sebagai pedoman dalam monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. Diharapkan semua bidang/bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) badan, bidang/ bagian, sub bidang/ sub bagian dan kinerja pegawai. Selanjutnya dokumen Rencana Kerja 2022 ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang dapat mengancam kesinambungan kinerja organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan terlebih dari seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.

Manokwari, 15 April 2022

Kepala BPKAD

The image shows an official oval stamp of the Kabupaten Manokwari government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI" at the top, "BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH" in the center, and "MANOKWARI" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

FERRI LUKAS, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630606 198403 1 007